

BAB III

DINAMIKA DEMOKRATISASI DI IRAK DAN SURIAH

Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan Amerika serta Negara- Negara sekutunya melakukan hegemoni internasional yang dimana hal tersebut tidak terlepas dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat sendiri. Keberhasilan dalam membangun imperium hegemoni ini ditujukan untuk segala bidang, baik itu dalam bidang sosial, politik maupun keamanan. Segala pencapaian ini sangatlah jelas tidak terlepas dari keinginan para pendiri Negara ini.

Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat strategis bagi Negara- Negara Barat termasuk Amerika. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Timur Tengah menjadi daya Tarik yang tidak bisa dihiraukan. Maka dari itu tak heran, Amerika Serikat bersama sekutunya melakukan intervensi dalam bentuk demokratisasi terhadap Negara- Negara Timur Tengah. Namun, tidak semua Negara Timur Tengah berhasil melakukan demokratisasi tersebut.

Dalam Bab III ini akan diuraikan doktrin yang dipakai oleh Amerika Serikat serta dinamika kegagalan demokratisasi di Irak dan Suriah.

A. Doktrinasi Demokratisasi Anerika Serikat

Peristiwa WTC 2001 membuat Amerika Serikat kehilangan citra sebagai Negara adidaya yang ramah serta bijaksana. Kebijakan Politik Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Amerika justru menunjukkan bahwa Amerika merupakan Negara paling berkuasa di dunia. Slogan “*war of terrorism*” menakuti dunia internasional. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat akan secara tidak segan untuk mengintervensi Negara yang mereka anggap sebagai sarang teroris.

Dengan dalih untuk keamanan internasional, Amerika menggunakan kembali istilah- istilah *unilateralism* dan *pre-emptive strike* untuk menggencarkan perang melawan teroris. Kebijakan Amerika dalam menumpas tuntas teroris ternyata di pengaruhi oleh berbagai doktrin dari para pendiri Amerika sendiri, diantaranya:

1. Doktrin Trauman

Harry Truman, Presiden Amerika Serikat ke-33 mengeluarkan sebuah doktrin dalam pidatonya pada tahun 1947. Pidato tersebut menyangkut keputusan Inggris yang menghentikan bantuan baik militer maupun ekonomi terhadap pemerintahan Yunani. Kejadian tersebut berlangsung pada saat terjadinya perang sipil dan partai Komunis di Yunani. Dalam pidatonya, Truman meminta kepada anggota Kongres agar mereka menyetujui adanya pemberian bantuan terhadap Yunani serta Turki. Trauma beralasan karena Inggris sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kedua Negara tersebut.

Menghambat penyebaran paham komunis merupakan kepentingan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II berakhir. Kekhawatiran Amerika terhadap kemenangan Partai Komunis di Yunani beralasan pada akan tersebarnya paham Komunis di seluruh Yunani sehingga berakibat bangkitnya kembali Uni Soviet. Maka dari itu, Trauman memberi usulan adanya bantuan dana untuk Yunani dan Turki senilai sekitar \$400.000.000 juga mengirimkan bantuan personil sipil dan militer Amerika Serikat kepada kedua Negara tersebut.

Pada 22 Mei 1947, usulan Trauman ini disetujui. Hal tersebut berdasar pada dua alasan, yakni:

- a. Ketidakstabilan akan terjadi di Turki apabila peperangan sipil di Yunani dimenangkan oleh kelompok Komunis. Ketidakstabilan tersebut ditakutkan akan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, mengingat Amerika Serikat mempunyai kepentingan di Timur Tengah.
- b. Amerika Serikat diharuskan membantu "*free peoples*" untuk berjuang melawan para rezim totaliter. Rezim totaliter ini akan merusak perdamaian Internasional sehingga harus diberantas.

2. Doktrin Monroe

James Monroe merupakan Presiden kelima Amerika Serikat yang mengeluarkan sebuah Kebijakan Luar Negeri yang dikenal dengan Doktrin Monroe. Doktrin yang

dikeluarkan pada 2 Desember 1823 ini berisi larangan segala macam tindakan campur tangan Negara- Negara Eropa terhadap Amerika. Selain itu, doktrin ini juga menegaskan sikap Amerika Serikat yang netral terhadap kemungkinan konflik yang terjadi di Eropa di masa depan. Doktrin ini kemudian mulai diperhitungkan ketika terjadi peristiwa Negara- Negara Eropa seperti Inggris dan Prancis yang melibatkan diri dalam aneksasi Texas. Kemudian selain itu, adanya keterlibatan Inggris di California³².

Adanya intervensi Negara- Negara Eropa terhadap Amerika merupakan alasan doktrin ini dikeluarkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan Rusia dalam menyebarkan pengaruh di Alaska serta mulai bangkitnya kolonialisme dari Spanyol. Alasan sebenarnya dari dikeluarkannya doktrin ini bukan semata- mata dari ketakutan Amerika akan adanya intervensi Eropa, namun karena Amerika ingin dengan mudah menguasai wilayah Amerika Selatan serta Utara. Doktrin ini kemudian dipakai oleh Presiden John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt³³.

3. Doktrin Nixon

Richard Nixon mengeluarkan sebuah doktrin pada tahun 1969 pada saat dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Nixon mengeluarkan doktrin ini pada saat perang Vietnam tengah berkejolak. Perang yang terjadi pada saat itu sudah berlangsung selama kurang lebih empat tahun lamanya. Perang tersebut tidak memberikan perkembangan yang bagus bagi pengaruh Amerika di Vietnam. Selain itu, sekitar 25000 nyawa tentara Amerika dan Vietnam melayang dengan sia- sia menambah pelik dampak perang ini³⁴.

³² Milestone Documents, *Monroe Doctrine (1823)* (Washington DC, 1995).

³³ Documents.

³⁴ Lisa Reynolds Wolfe, *The Nixon Approach: Iran and Iraq*, 2010 <<http://www.coldwarstudies.com/2010/06/07/the-nixon-approach-iran-and-iraq/>>.

Pada kunjungan Nixon ke Guam tahun 1969, terdapat dua pernyataan tegas yang Presiden Amerika Serikat ini keluarkan, yakni:

- a. Meyakinkan Asia bahwa Amerika adalah “teman” serta menekankan bahwa Amerika Serikat akan menjaga komitmen perjanjian yang dibuat.
- b. Rencana Vietnamization diumumkan oleh Nixon ketika Vietnam War. Isi dari Vietnamization ini adalah adanya penarikan tentara Amerika dari konflik di Asia Tenggara kemudian mereka menggantikannya dengan pasukan Vietnam Selatan. Kemudian setelah itu, Amerika melakukan perjanjian damai dengan Vietnam secara resmi.

4. Doktrin Bush

Doktrin ini muncul pada saat pemerintahan George W. Bush. Kemudian dipakai pertama kali oleh Charles Krauthammer yang dimana doktrin ini menggambarkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian ABM dan juga dari Protokol Kyoto. Kejadian terror WTC membuat Amerika Serikat merasa memiliki hak untuk melindungi diri dari serangan teroris. Dengan begitu, Amerika Serikat juga memiliki hak untuk menyerang Negara yang dianggap menjadi “sarang teroris” dengan alasan keamanan internasional. Selain itu juga, Amerika merasa berhak menggulingkan rezim yang mengancam keamanan Amerika Serikat sendiri³⁵.

Isi dari doktrin ini merupakan strategi- strategi, keputusan serta ide- ide yang akan mengantarkan Amerika Serikat dalam membuat Kebijakan Luar Negerinya. Terdapat dua pilar dalam doktrin ini, yakni:

- a. Musuh yang dianggap potensial akan menerima serangan preemptive,
- b. Mempromosikan demokrasi.

³⁵ Heajeong Lee, ‘The Bush Doktrin: A Critical Appraisal’, *The Korean Journal of International Relations*, 43 (2003).

B. Dinamika Demokratisasi Irak

Sebelum terjadi kerenggangan antara Amerika dan Irak, kedua Negara ini memiliki hubungan yang harmonis pada 1960-an. Peristiwa ini terjadi ketika Amerika dan Inggris datang berkunjung ke Baghdad sebagai promosi *Against Communism Campaign*. Dalam hal ini, terdapat bujukan dari Saddam Husein agar dapat membina hubungan baik dengan Negara ini. Tujuannya adalah agar Saddam Husein mendapat dukungan dalam melawan kudeta yang dilakukan oleh Abdul Karim Kasim. Usaha yang dilakukan oleh Saddam Husein ini kemudian membuahkan hasil yakni bergabungnya Irak dengan Pakta Baghdad anti Soviet³⁶.

Hubungan antara Amerika dan Irak kemudian bertambah baik pada pertengahan 1960-an. Dibuktikan dengan Amerika Serikat mengirimkan tenaga kesehatan serta dokter, pengajar dan juga insinyur teknik ke Irak. Selain hal tersebut, Amerika juga mendukung penuh Irak dalam peperangan yang melibatkan Iran pasca revolusi.

Kemudian hubungan antara Amerika Serikat dan Irak menjadi renggang seiring berjalannya waktu. Isu terorisme menjadi hal yang mendasar dari kerenggangan hubungan ini. Adanya tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh rezim Saddam Husein menjadikan Amerika Serikat menekan Irak serta pemerintahannya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas isu genosida serta terorisme yang mengancam keamanan internasional.

Semenjak peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika, isu teroris menjadi masalah yang paling mengancam internasional. Ditambah dengan pernyataan Presiden Bush yang mengaitkan perang dan terorisme. Selain itu, Timur Tengah, Afrika dan juga Asia diliputi oleh aktivitas teroris yang mengancam, terdapat juga pelecehan sosial serta merajalelanya ketidakadilan hukum yang membentuk masyarakatnya menjadi demikian. Namun bukan berarti Amerika dan Eropa terbebas dari hal tersebut. Melainkan Amerika dan Eropa masih terikat dengan kekacauan politik juga kekerasan sosial.

³⁶ Roger Morris, *A Tyrant 40 Years in the Making* (New York, 2003).

Dari isu teroris tersebut menjadikan Amerika berusaha untuk membentuk pemerintahan yang demokratis di Irak. Terdapat beberapa tahap dalam proses mendemokrasi Irak. Tahap- tahap tersebut menjadi cikal bakal adanya pemerintahan transisi Irak. Irak melakukan pemilu pada tahun 2005. Namun, upaya demokratisasi itu tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat. Hal tersebut menimbulkan dasar keyakinan Amerika atas munculnya gerakan teroris di Irak. Gerakan teroris ini menentang kebijakan Amerika Serikat dalam usaha demokratisasi Irak.³⁷

Terbentuknya gerakan teroris bermula dari adanya dorongan dari negayra yang ingin melanggengkan kekuasaanya serta banyaknya *state sponsored terrorism*. Kejadian pada 11 September menjadikan pergantian dari *state sponsored terrorism* ke *transnasional terrorism* terlihat semakin intensif. Hal ini merupakan buah dari *war on terror* yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Terdapat faktor- faktor yang menyebabkan *state sponsored terrorism* berganti menjadi *transnational terrorism*, diantaranya:

1. Pada masa *war of terror* berbagai operasi untuk memberantas terorisme dilakukan oleh banyak pihak secara masif. Adanya upaya masif yang dilakukan secara multilateral maupun melalui badan internasional membuat Negara- Negara yang memiliki hubungan dengan terorisme semakin terdesak. Selain itu Doktrin Bush yakni "*Either you with us or with the terrorist*" menjadikan Negara- Negara berbalik memberantas terorisme.
2. Kemunculan actor- actor non-negara bermunculan setelah perang dunia kedua. Hal ini diakibatkan oleh ars globalisasi yang semakin kuat dan intens sehingga Negara- Negara memiliki tantangan dari actor non-negara. Selain itu, gerakan *transnational terrorism* banyak mengandalkan teknologi demi kemudahan mencari serta menyebarkan informasi. Mereka juga mempelajari pola jaringan transnasional

³⁷ Ditto Rizky Samudra, 'Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Terorisme Irak', *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7.2 (2018), 283–91.

terrorism yang bersifat sporadis, sehingga model sel- sel yang menjadikan pelacakan tidak mudah bahkan terkesan sangat susah.

3. Terorisme transnasional menjadi opsi yang paling strategis karena praktek yang dilakukan bersifat sporadis. Terorisme disebarkan menimbulkan ketakutan- ketakutan serta aksi penyerangan secara mendadak untuk menyampaikan tujuan kelompok.

Amerika Serikat sebagai Negara adidaya secara tidak langsung membuat Negara- Negara Islam serta gerakan fundamentalis Irbih memilih menggunakan terorisme dalam menjalankan aksinya. Alasan lain yang menjadikan terorisme transnasional menjadi pilihan adalah karena apabila terorisme masih disponsori oleh Negara maka serangan serta opsi gerakan dari terorisme itu sendiri akan terbatas. Maka dari itu, terorisme transnasional bergerak sebagai salah satu aktor kelompok internasional yang tidak terikat dengan ideologi serta batas- batas Negara.³⁸

Demokrasi diyakini sebagai salah satu cara untuk mengurangi potensi terorisme di suatu Negara. Pemilihan umum dapat membuat rakyat dengan bebas memilih siapa pemimpin mereka. Dalam demokrasi terdapat aturan yang memungkinkan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Saddam Husein telah menjadi orang yang paling berpengaruh di Irak sejak tahun 1970-an. Saddam berhasil merebut kekuasaan dari kekuatan politik utama pemerintahan tersebut dengan cara penguasaan sistem keamanan serta menggunakan politik partai Baathist.

Saddam Husein yang naik pada 1979 seolah mencerminkan sebuah proses yang formal dalam pemilihan presiden. Hal ini juga menunjukkan bahwa Irak menganut paham otokrasi dibandingkan dengan paham anokrasi dalam pemerintahannya. Paham anokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana terdapat nilai dari gabungan antara demokrasi dan otokrasi. Kebijakan otokrasi tersebut menandakan adanya sebuah esensi dimana terdapat otokrasi yang ekstrem, yaitu terpilihnya seorang pemimpin tertinggi

³⁸ Samudra.

secara tidak sah. Serta tidak memiliki oposisi maupun hambatan dalam kepemimpinannya, juga hilangnya partisipasi politik yang dilakukan secara nyata.

Adanya represi berat terhadap kebebasan sipil dan hak politik yang dialami oleh masyarakat Irak menjadi bukti kuat terjadinya otokrasi ekstrem tersebut. Pemerintahan Saddam Husein yang sangat otoriter ditunjukkan dengan kontrol berbagai hal sampai titik maksimal, baik itu dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan non-negara yang dilakukan oleh masyarakat Irak. Tidak heran apabila tidak terdapat satu organisasi pun yang bergerak tanpa ijin dari Saddam Husein.

Kehadiran Ansar al- Islam di wilayah utara membuktikan tidak terhentinya kegiatan kelompok insurjen di Irak. Kelompok ini merupakan cikal bakal Al- Qaeda di Irak yang bergerak secara masif pada sekitar tahun 2000-an. Ansar al- Islam yang terbentuk pada 1998 menjadi sebuah faksi yang memisahkan diri dari kelompok Kurdi yang merupakan pecahan dari *Islamic Movement of Iraq Kurdish*. Terdapat asumsi dimana Anhsar al- Islam merupakan cikal bakal Al- Qaeda di Irak, yakni kekalahan Taliban dan Al- Qaeda di Afghanistan oleh pasukan Amerika Serikat.

Sekitar tahun 2001, sebelum terjadinya penyerangan 9/11, kepemimpinan Al- Qaeda di Afghanistan menerima kunjungan di pemimpin faksi Islam Kurdi. Pertemuan tersebut membicarakan sebuah rencana pembentukan Al- Qaeda di Irak Utara. Ditemukannya sebuah dokumen di Kabul yang berisi pernyataan tujuan dari kelompok tersebut yaitu untuk mengusir orang- orang Yahudi dan Kristen yang berada Kurdistan serta mengajak orang- oaring untuk bergabung dengan jalan jihad.

Irak memulai proses demokratisasi setelah sukses menggulingkan rezim Baath pada sekitar tahun 2003. Pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika, Irak mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan sosial, ekonomi serta politik yang diakibatkan oleh perang yang terjadi antara Amerika dan Irak. Perubahan sosial terbesar yang terjadi di Irak berlangsung setelah penggulingan rezim Saddam Husein. Perubahan sosial ini berujung pada perang saudara antara

pendukung Saddam Husein dengan para oposisi yang sangat kontra dengan pemerintahan Saddam Husein.

Dari berbagai masalah yang terjadi di Irak, minyak merupakan masalah yang utama. Minyak bumi yang dimiliki Irak sangat diinginkan oleh Amerika Serikat dan merupakan salah satu sebab terjadinya invasi Amerika Serikat ke Irak. Bahkan Amerika Serikat menggunakan minyak untuk menegakkan demokrasi di Irak. Pasca invasi, Amerika memasukan perusahaan- perusahaan swasta miliknya yang berada di Irak untuk mengeksplorasi cadangan minyak yang berada di Irak. Amerika Serikat mengandalkan program rekondruksi infrastruktur minyak yang menyebabkan jatuhnya kondisi ekonomi Irak.

Dalam menegakkan demokratisasinya di Irak, Amerika Serikat berhasil menggulingkan rezim Saddam Husein yang otoriter. Setelah pemilu dilaksanakan, legitimasi rakyat sangat rendah. Adanya kecurigaan rakyat terhadap pemerintahan boneka yang dibentuk oleh Amerika Serikat menjadi penyebabnya. Legitimasi politik yang rendah tersebut menyebabkan meningkatnya angka kekerasan serta adanya ketidakstabilan politik. Konflik terus terjadi karena penguasa dianggap gagal dalam menjalankan kekuasaannya. Ditambah dengan rakyat yang tidak mau menuruti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Masa transisi yang pelik menyebabkan Irak menjadi kaca. Kehadiran tentara bayaran yang dipercaya disewa oleh Amerika Serikat menambah buruk konflik yang terjadi di Irak. Selain karena tentara bayaran yang banyak menyerang Irak, penguasaan minyak bumi serta adanya proyek pembangunan dengan keuntungan yang sangat besar membuat Amerika semakin tidak mau melepas Irak.³⁹

Berikut merupakan tabel indeks demokrasi berdasarkan fungsi pemerintahan, budaya politik, partisipasi politik, proses

³⁹ Wirawan Sukarwo, *Tentara Bayaran AS Di Irak* (Jakarta: GagasMedia, 2009).

pemilihan umum dan pluralisme serta kebebasan sipil menurut *The Economist Intelligence Unit*.⁴⁰

Tabel 1. Economist Intelligence Unit democracy index 2018 (1)

	Rank	Overall Score	Category scores				
			Electoral process and pluralism	Function of government	Political participation	Political culture	Civil liberties
Norway	1	9.87	10.00	9.64	10.00	10.00	9.71
US	25	7.96	9.17	7.14	7.78	7.50	8.24
Israel	30	7.79	9.17	7.50	8.89	7.50	5.88
Georgia	89	5.50	7.83	3.57	6.11	4.38	5.59
Iraq	114	4.06	4.75	0.07	6.67	5.00	3.82

Berdasarkan tabel di atas, Irak berada di peringkat ke 114 dengan perolehan nilai 4.06. Salah satu bentuk gagalnya demokratisasi di Irak terdapat pada sangat rendahnya fungsi pemerintahan. Karena dalam Negara demokratis apabila sebuah keputusan yang seharusnya ditentukan oleh pemerintah melalui perwakilan rakyat tidak terjadi maka konsep demokrasi tersebut menjadi tidak bermakna. Begitu pula dengan partisipasi rakyat dalam politik, walaupun berada diatas Georgia namun nilai ini masih terhitung rendah. Rendahnya partisipasi rakyat juga diakibatkan oleh kebebasan sipil yang rendah. Masalah rendahnya fungsi pemerintah serta proses pemilihan umum merupakan akibat dari lemahnya budaya politik Irak.

Demokratisasi di Irak bisa dikatakan gagal karena konflik yang berkepanjangan. Ditambah dengan pembentukan pemerintahan boneka oleh Amerika Serikat yang membuat hrakyat Irak semakin tidak yakin dengan demokrasi. Ketidaksiapan rakyat serta paksaan dari Amerika Serikat menambah alasan kegagalan demokratisasi di Irak.

⁴⁰ The Economist Intelligence Unit, *Democratic Advances, and a Long Way to Go Asia in The EIU's 2018 Democracy Index*, 2019.

C. **Dinamika Demokratisasi di Suriah**

Suriah merupakan sebuah Negara yang terbilang cukup stabil bila dibandingkan dengan Negara lain yang terlibat Arab Spring. Sama seperti Negara tetangganya, pemerintahan Suriah juga menganut sistem otoriter. Suriah dipimpin oleh satu partai penguasa yang mewarisi kepemimpinannya secara turun temurun.

Arab Spring dianggap sebagai penyelamat dari krisis pemerintahan yang terbilang kejam. Berbagai protes dilakukan oleh rakyat Suriah demi mendapat perhatian dari pemerintah serta menghilangkan ketidakadilan di negaranya. Tidak cukup hanya dengan protes dan turun ke jalan, aksi bakar diri yang pernah dilakukan oleh Mohamed Bouazizi kembali dilakukan oleh Hasan Ali Akhleh, seorang penduduk al- Hasaka.

Demonstrasi besar- besaran memuncak pada Februari 2011. Demonstrasi tersebut diserukan dengan melalui situs- situs media baik di dalam maupun di luar Suriah. Hal tersebut untuk mendesak pemerintah segera melakukan reformasi. Namun disayangkan, aksi yang mereka lakukan tidak memberikan hasil yang sama seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Para demonstran juga mendapat ancaman dari pihak keamanan agar segera menghentikan demo serta berbagai aksi tentang seruan reformasi tersebut. Akhirnya, ancaman- ancaman yang diterima oleh para demonstran berhasil menyurutkan semangat revolusi secara perlahan.

Semangat revolusi yang sempat redup kembali berkobar tatkala terdengar kabar adanya penyiksaan anak- anak yang melakukan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan di Deera. Deera merupakan sebuah kota yang berbatasan dengan Yordania. Dari kota inilah kemudian semangat Bouazizi berkibar. Hal tersebut karena rakyat sudah tidak bisa mentoleransi penyiksaan terhadap anak-anak. Alasan lain yang menyebabkan rakyat Suriah kembali terbakar semangatnya adalah keadaan perekonomian yang semakin memburuk.

Di kota seperti Deera, Dayar al- Zor, al- Hasaka, Banis serta Hama demonstrasi diwarnai bentrokan. Selain itu, di damaskus hanya berlangsung demo kecil- kecilan. Terdapat laman facebook yang bernama “Revolusi Suriah 2011” yang

diyakini berpusat di London memposting foto- foto demonstrasi di berbagai tempat seperti Berlin, Paris bahkan Istanbul yang mendukung demonstrasi di Suriah.

Bukan hanya aktifis di dnia nyata saja yang melakukan demonstrasi, namun juga para aktifis di seluruh dunia yang melakukan demonstrasi dengan menggunakan dunia maya. Berbagai protes dilakukan dengan cara memposting foto- foto di sosial media. Foto- foto tersebut berkaitan dengan kekejaman yang dilakukan oleh para tentara pemerintahan Suriah. Karena hal ini, wartawan asing dilarang untuk masuk ke Suriah.

Demonstrasi serta aksi yang dilancarkan oleh rakyat membuat rezim Basyar Asad menjadi geram. Pemerintahan kemudian mengerahkan kekuatan militer untuk menyakiti serta melakukan penindasan kepada rakyatnya sendiri. Tentu saja ghal ini menyebabkan korban berjatuhan sangat banyak. Kekejaman yang dilakukan oleh rezim pemerintahan menjadi bukti betapa brutalnya rezim ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ancaman serta kekejaman pemerintah tidak membat semangat rakyat menjadi terhenti. Perlawanan semakin kuat, rakyat bersatu padu menuntut lengsernya rezim Basyar Asad dari pemerintahan Suriah.

Krisis yang terjadi di Suriah tidak terlepas dari peran aktor utama, yakni Rezim Basyar Asad, oposisi serta intervensi dari Amerika Serikat.

1. Rezim Basyar Asad

Rezim Basyar Asad terkenal dengan pemerintahan yang otoriter seta represif. Alasan inilah yang membuat Suriah tidak pernah bergaul dengan dunia Internasional, bahkan terseksan terkucilkan dari dunia Internasional. Bukan hanya itu, Suriah juga dikucilkan oleh Negara tetangga dan oleh sebagian Negara barat termasuk Amerika Serikat yang jelas- jelas sangat menjunjung tinggi HAM. Tentu saja hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mesir yang mempunyai kedekatan dengan Amerika Serikat.

Akibat dari tidak dekatnya Suriah dengan Negara Barat termasuk Amerika, mereka meyakini tidak akan tersapu gelombang revolusi seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir serta Negara Arab lainnya. Karena pemerintahan

Suriah berpikir yang terkena dampak dari revolusi hanya Negara- Negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika saja. Maka dari itu Suriah merasa tidak khawatir dengan gelombang revolusi yang menyerang Negara tetangganya.

Presiden Basyar Asad menegaskan dalam pidatonya, Suriah tidak akan menghadapi persoalan yang menyangkut dengan revolusi seperti yang terjadi pada Ben Ali di Tunisia ataupun Husni Mubarak di Mesir. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kedekatan antara Suriah dengan Amerika Serikat ataupun dengan Negara barat lainnya. Dalam pidatonya tersebut, Basyar Asad menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang unsur penting dalam pemerintahannya. Rakyatnya juga tidak hanya hidup dengan bersandarkan kepentingan namun juga berlandaskan kepercayaan terutama dalam ideologi.

James L. Gelvin menulis dalam *The Arab Uprisings, What Everyone Needs to Know*, terdapat lima alasan yang menjadi keyakinan para ahli mengapa Suriah tidak langsung mengalami pergolakan yang tengah terjadi di Timur Tengah.⁴¹

- a. Basyar Asad dipercaya sebagai seorang pembaharu yang merupakan hasil didikan barat. Ayahnya tidak mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin. Basyar menjadi pemimpin pengganti untuk kakaknya yang meninggal karena kecelakaan. Basyar juga dipercaya baru belajar politik pada saat dia ditunjuk untuk menggantikan kakaknya.
- b. Husni Mubarak yang diyakini sebagai “bonekanya” Amerika Serikat sangat berbanding terbalik dengan Basyar Asad. Basyar Asad dikenal sebagai pimpinan perlawanan anti-imperialis. Pimpinan Hamas ditampung Damaskus dan sangat berhubungan baik dengan Hizbullah serta menjadi sponsor Hizbullah.
- c. Gerakan perlawanan Ikhwanuk Muslimin menjadi pengalaman Suriah dalam menumpas gerakan yang

⁴¹ James L. Gelvin, *The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know* (Los Angeles: Oxford University Press, 2012).

melawan pemerintah. Penumpasan gerakan tersebut terjadi di Hama pada tahun 1982. Pada saat itu, Hama dihujani bom yang mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal. Dalam hal ini, Damaskus tidak main-main dalam menumpas gerakan perlawanan.

- d. Dukungan dari kaum minoritas dapat diterima oleh Pemerintahan Suriah. Hal ini dikarenakan Suriah merupakan Negara yang heterogen secara agama. Kelompok minoritas seperti Kristen mendukung rezim pemerintahan yang berkuasa. Inilah salah satu strategi pemerintahan Suriah agar dapat terus mendapat dukungan dari rakyatnya.
- e. Suriah akan tetap berpegang pada keyakinan bahwa negaranya tidak akan terkena dampak arus revolusi. Meskipun demonstrasi-demonstrasi terus terjadi di Suriah. Demonstrasi yang terjadi di Damaskus pada tahun 2011 dengan cepat dapat diatasi. Kemudian demonstrasi yang menamakan diri mereka “Revolusi Suriah 2011 melawan Basyar Asad” hanya dihadiri oleh sekitar 200 orang saja.

Walaupun Basyar Asad telah sangat teliti dalam menjalankan pemerintahannya, namun adanya perubahan berhasil menumbangkan rezim ini. Hal ini diakibatkan adanya dorongan dari Negara-Negara yang berhasil melakukan revolusi. Kemajuan teknologi mempermudah rakyat Suriah untuk mengakses informasi. Sehingga gelombang revolusi pun terjadi.

Kondisi perekonomian yang buruk menyebabkan rakyat Suriah merasa tidak puas terhadap pemerintah. Hal ini merupakan dampak dari kronisme neo-liberal yang dikembangkan oleh Basyar Asad. Adanya pembongkaran industri-industri produktif yang sebelumnya mampu mempekerjakan banyak tenaga kerja merupakan salah satu cara pembaharuan ekonomi yang dilakukan oleh Basyar Asad. Kemudian sistem ekonomi diganti menjadi sistem perekonomian rente yang dimana perekonomian dikontrol dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan rezim Basyar Asad.

2. Oposisi

Terdapat kelompok oposisi di Suriah yang memiliki perbedaan pandangan sangat jauh dengan pemerintah. Berdasar pada ketidakpuasan terhadap rezim Basyar Asad serta memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahan kemudian membentuk sebuah Dewan Nasional Suriah yang bertujuan menyatukan aspirasi yang berbeda-beda.

Terdapat tentara pembebasan Suriah atau yang lebih dikenal dengan *Free Syrian Army* (FSA) yang merupakan angkatan bersenjata bagi para oposisi Suriah. Tentara-tentara ini merupakan para personel Angkatan Bersenjata Suriah yang tidak lagi setia terhadap pemerintah atau juga para relawan. FSA dibentuk pada sekitar bulan Agustus tahun 2011. Pembentukannya diumumkan secara resmi dalam sebuah video internet yang dirilis oleh sekelompok berseragam militer Suriah.⁴²

Pemimpin FSA, Kolonel Riad al-Asaad mengumumkan akan bekerja sama dengan para demonstran untuk yang membela kebenaran dengan cara menurunkan sistem serta mengganti rezim yang berkasa. Kolonel Riad juga mengatakan tidak akan segan membunuh para pasukan keamanan yang menyakiti warga sipil. FSA juga berkordinasi dengan Dewan Nasiona Suriah yang mendukung terjadinya revolusi.

Daerah operasi FSA meliputi seluruh wilayah Suriah, baik perkotaan maupun pedesaan. Pasukan aktif dari organisasi ini berada di wilayah tengah dan memiliki sekitar Sembilan battalion. Koalisi Nasional Suriah (SNC) dibentuk pada November 2012. Dewan ini memiliki sekitar 22 dari 60 kursi di Koalisi Suriah.

Kemunculan banyak oposisi menandakan bahwa Suriah berada dalam keadaan lemah. Kekuatan dari oposisi

⁴² E O'Bagy, *The Free Syrian Army* (Washington DC, 2013) <<https://understandingwar.org/sites/default/files/The-Free-Syrian-Army-24MAR.pdf>>.

yang berimbang dengan pasukan keamanan menyebabkan konflik yang terjadi semakin besar. Hal ini menyebabkan Suriah tidak lagi aman bagi warga sipil. Usaha dari oposisi yang sampai pada rencana pembunuhan kepala pemerintah membuat pasukan keamanan semakin gencar melakukan perlawanan. Konflik yang semakin bergejolakn membuat trauma bagi para warga sipil. Sehingga banyak warga sipil yang memilih meninggalkan Suriah.

3. Intervensi Amerika Serikat

Amerika Serikat mempunyai kepentingan di Timur Tengah, termasuk di Suriah. Terkait krisis yang terjadi di Suriah, Gedung Putih mengeluarkan sebuah pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Suriah harus menghentikan penindasan kepada rakyatnya. Gedung Putih juga menekankan pemerintah Suriah harus lebih mendengarkan rakyat, agar reformasi politik dapat berjalan dengan damai. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan pertemuan dengan para tokoh oposisi Suriah.

Pemerintah Suriah didesak untuk menghormati dan menegakkan HAM di negaranya. Hillary Rodham Clinton mengatakan bahwa rakyat Sriaiah masih mempunyai harapan untuk perubahan. Beberapa hari setelah itu, Negara- Negara Uni Eropa seperti Inggris, Jerman, Swedia serta Belanda melakukan larangan perjalanan terhadap anggota rezim Basyar Asad. Kemudian, Amerika Serikat juga menawarkan tawaran kepada pemrintah Suriah yakni transisi menjadi demokrasi atau mundur dari pemerintahan.

Namun, mundurnya Basyar Asad juga akan memunculkan kekhawatiran yang lebih parah. akan terjadi kerusuhan antar etnis yang dimana kelompok Sunni akan meluapkan sakit hatinya karena merasa terpinggirkan. Kemudian juga akan adanya kekosongan kekuasaan yang ditakutkan akan dimanfaatkan oleh persaudaraan Muslimam untuk merebut kekuasaan.

Demokratisasi dinilai akan berhasil dalam menjawab krisis Suriah, namun ternyata hal tersebut justru menjadi boomerang bagi Negara itu. Beberapa alasan mengapa

demokratisasi tidak berjalan sesuai keinginan di Suriah, antara lain:

- a. Mekanisme demokrasi dianggap cacat, karena sudah tidak adanya lagi kepercayaan antara masing- masing pihak yang bertikai. Hal ini dikarenakan pemilu selalu dimenangkan oleh klan Basyar Asad selama lima periode berturut- turut. Maka dari itu, mekanisme demokrasi dianggap gagal. Akibatnya, muncullah sikap apatis dari rakyat terhadap pemerintah. Dikarenakan institusi hanya dijalankan menurut kelompok tertentu saja.
- b. Adanya kecenderungan dalam pelaksanaan pemilu menyebabkan pihak oposisi yang kalah dari pemerintahan Basyar Asad tidak menerima kekalahannya. Demokrasi tidak dapat mengubah pola pemerintahan yang dijalankan oleh keluarga al- Assad.
- c. Adanya sikap paling mendominasi dari pihak mayoritas menyebabkan kecenderungan sulit berkompromi. Hal tersebut diakibatkan adanya sifat merasa paling kuat dan sangat sulit meleburkan sifat tersebut dalam bentuk nasionalisme. Meskipun dalam demokrasi, kelompok- kelompok ini akan tetap berada di zona nyaman. Maka dari itu, tidak akan mudah apabila kelompok mayoritas disatukan dengan kelompok minoritas dalam satu daerah yang sama. Apabila hal tersebut terjadi, maka konflik akan terus menghantui mereka.
- d. Permainan politik didasari kepentingan kelompok didalamnya. Demokrasi hanya dianggap sebagai kompetisi untuk dapat memenuhi kepentingan satu kelompok. Penempatan posisi orang oleh orang yang memiliki kepentingan dianggap sebagai salah satu cara mempertahankan rezim. Dalam mekanisme demokrasi Suriah, penempatan kolega ataupun keluarga agar kekuasaan tetap berada di tangan keluarga al- Assad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi hanya dianggap sebagai alat untuk dapat melegalkan kekuasaan saja

- e. Tidak ada komitmen yang dapat dipegang oleh pihak-pihak yang berkonflik. Selalu muncul tindak kekerasan dalam bentuk penggunaan senjata konvensional atau pun bentrokan.

Konflik internal yang terjadi di Suriah merupakan perpanjangan tangan dari bentuk intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Demokratisasi yang diiming-imingi dapat merubah sistem pemerintahan menjadi lebih baik ternyata hanya isapan jempol belaka. Berbagai pertemuan perjanjian damai dilakukan namun hanya berakhir gagal. Demokrasi hanya dijadikan sebagai alat agar kekuasaan dapat terus berada di tangan rezim Asaad.

Berikut adalah indeks demokrasi Suriah menurut *The Economist Intelligence Unit*⁴³

Tabel 2. *Economist Intelligence Unit democracy index 2018 (2)*

	Rank	Overall Score	Category scores				
			Electoral process and pluralism	Function of government	Political participation	Political culture	Civil liberties
Norway		9.87	10.00	9.64	10.00	10.00	9.71
US	25	7.96	9.17	7.14	7.78	7.50	8.24
Israel	30	7.79	9.17	7.50	8.89	7.50	5.88
Iraq	112	4.06	4.75	0.07	6.67	5.00	3.82
Syria	166	1.43	0.00	0.00	2.78	4.38	0.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Suriah berada dalam peringkat ke 166 dibawah Irak. Hal ini juga terlihat dari partisipasi politik yang sangat rendah yakni hanya 2,78 yang menandakan kurangnya fungsi pemerintahan sehingga mengakibatkan budaya politik budaya politik yang terbilang buruk. ditambah dengan kebebasan sipil yang dinilai sangat rendah membuat Suriah hanya memiliki nilai 0.00 dibanding dengan Irak yang mencapai 3.82.

Indeks demokrasi tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi suatu Negara. Karena indeks

⁴³ Unit.

tersebut meliputi proses pemilu, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik serta kebebasan sipil yang merupakan garis besar penilaian keberhasilan demokrasi. Konsep demokrasi akan menjadi tidak bermakna apabila salah satu aspek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.